

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PT. PLN (Persero) SEBAGAI
PELAKU USAHA DIDALAM PENYEDIAAN LISTRIK BAGI
KONSUMEN**

IRPAN / D 101 07 168

ABSTRAK

Penelitian ini Berjudul Tinjauan Hukum Tentang PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen, dengan rumusan masalah bagaimanakah hubungan hukum antara PT.PLN (persero) pelaku usaha dan masyarakat (Konsumen) pengguna jasa dan bagaimanakah tanggung jawab PT.PLN (Persero) dalam penyediaan listrik bagi masyarakat (konsumen). tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan memahami, hubungan hukum antara PT. PLN (persero) pelaku usaha dan masyarakat (konsumen) pengguna jasa dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab PT. PLN (persero) dalam penyediaan listrik bagi masyarakat (konsumen).

Metode pendekatan yang digunakan yaitu, metode analisis yuridis normatif. Dimana penelitian ini dilihat dari hubungan hukum antara PT. PLN (persero) pelaku usaha dan masyarakat (konsumen) pengguna jasa yaitu, dapat di lihat dari adanya suatu kontrak perjanjian pemasangan aliran/ voltase listrik, oleh PT. PLN (Persero), dengan pihak konsumen, sesuai dengan kesepakatan yang diatur didalam Pasal 1338 KUH perdata tentang asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian; dimana posisi para pihak haruslah seimbang, namun dalam kenyataannya, tidak demikian, masyarakat sering dirugikan oleh tindakan PT PLN (Persero) disamping itu, kedua pihak harus melaksanakan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-keajiban para pihak. Dan juga memenuhi asas-asas hukum perlindungan konsumen dan Tanggung jawab PT. PLN (Persero) dalam penyediaan listrik bagi masyarakat (Konsumen) yaitu, PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya yang diberikan kewenangan oleh pemerintah melalui Pasal 33 UUD 1945, maka amanat tersebut haruslah dilaksanakan secara profesional, adapun dalam kenyataannya PT.PLN (Persero) di Kota Palu belum melaksanakan secara sepenuhnya, hal ini dapat di lihat sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak, yang berlangsung sampai 12 jam, dan berulang dalam waktu dua atau tiga bulan, belum mencerminkan visi dan misinya PT. (Persero) yaitu, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh lapisan masyarakat, disamping mencari keuntungan.

Kata Kunci : PLN, Penyediaan Listrik, Konsumen.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Listrik merupakan sarana yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, karena sebagai prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang produksi diberbagai sektor. Tenaga listrik merupakan prasarana yang dibutuhkan oleh rakyat dalam menunjang aktivitas kehidupan

sehari-hari. Oleh karena itu, ketersediaan listrik harus dijamin agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak sekaligus tulang punggung ekonomi nasional, dengan demikian maka tenaga listrik merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Hal ini sebagai kewajiban dan salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah kepada

rakyat Indonesia, rakyat dalam hal ini tidak boleh dirugikan, misalnya dalam pembuatan kontrak pemasangan listrik, dan pemadaman listrik secara sepihak. Listrik memiliki peranan yang sangat vital buat manusia, baik di pedesaan, maupun di perkotaan. Sebagai contoh tenaga listrik sangat di butuhkan untuk berbagai kegiatan, misalnya, kegiatan industri, kegiatan perkantoran, kegiatan rumah tangga, kegiatan bisnis hiburan, kegiatan riset atau pendidikan; serta berbagai kegiatan lain yang sangat membutuhkan tenaga listrik. Besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah di Indonesia hal ini, membuat kebutuhan akan listrik terus meningkat, sementara kenyataannya pemerintah dalam hal ini PT. PLN (Persero) memiliki keterbatasan dalam pengembangan di bidang pelistrikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Hubungan Hukum Antara PT. PLN (Persero) Pelaku Usaha dan Masyarakat (Konsumen) Pengguna Jasa..?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Dalam Penyediaan Listrik Bagi Masyarakat (Konsumen).

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian PT. PLN (Persero) dan Perlindungan Konsumen

Pengertian PT. PLN (Persero) adalah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagai bagian integral pembangunan nasional yang bertujuan yaitu, “meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong kegiatan ekonomi”.

Untuk mengatur dan mengawasi penyediaan tenaga listrik di daerah yang telah menerapkan kompetisi dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Badan ini yang mengeluarkan aturan yang diperlukan dalam menunjang mekanisme pasar meliputi antara lain:

1. aturan jaringan (*Grid Code*),
2. aturan distribusi (*Distribution Code*),
3. aturan pentarifan (*Tariff Code*),

4. aturan untuk lelang pengadaan instalasi/sarana penyediaan tenaga listrik (*Procurement and Competitive Tendering Code*) dan lain-lain,

5. termasuk penegakan hukumnya (*law enforcement*).

B. Dasar Hukum Penguasaan PT. PLN (Persero) Dalam Penyediaan Listrik

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenaga Listrik yang menempatkan PLN (Persero) selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Salah satu pilar ekonomi nasional dengan bentuk badan hukum Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara, lalu berubah bentuk badan usaha yaitu, menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 menyatakan, bahwa maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan dalam Pasal (1) adalah, menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Pasal (2) P.P Nomor 23 Tahun 1994 menyatakan bahwa maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) adalah, menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan ekonomi, mencari untung agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Dalam Konsideran UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Oleh karena itu Keputusan dan kebiasaan (Asas Kebebasan berkontrak) sebagai landasan di dalam perikatan kontrak penggunaan tenaga listrikan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Buku III, KUH Perdata Tentang Perikatan yaitu; Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan :“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan UU berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang, Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pasal 1320 KUH Perdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu, syarat subyek (Point 1 dan 2) dan syarat obyektif (Point 3 dan 4) :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh suatu pihak yang dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak yang lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain maka dengan demikian tidak akan ada kesepakatan. Oleh karena itu diperlukan dua pihak untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pihak PT. PLN (Persero) sebagai pihak yang berwenang di dalam pengadaan tenaga listrikan (bekerjasama dengan

pihak swasta, dalam hal pemasangan instalatir, didalam rumah/ gedung) dan Masyarakat sebagai pemakai listrik.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Umumnya semua orang adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun, atau belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah. Dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang ditaruh dibawah pengampuan (gila, dungu, mata gelap, lemah akal dan pemboros). Perjanjian pelayanan tenaga listrikan sangat jelas para pihaknya sudah dewasa (tidak berada dibawah pengampuan), karena proses pemasangan listrik dilakukan secara langsung, konsumen selaku kepala rumah tangga mengajukan surat permohonan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan persyaratan-persyaratan lainnya. Jika ternyata orang yang melakukan transaksi adalah, orang yang tidak cakap misalnya, Konsumen tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran bulanannya atau konsumen merusak segel meteran milik PT. PLN (Persero), atau konsumen melanggar hal-hal yang sudah disepakati bersama, maka pihak PT. PLN (Persero) mengambil tindakan pengecualan meteran listrik di rumah tersebut.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok daripada perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, dan merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan, apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya. Adapun yang menjadi objek adalah, pemasangan instalatir dan besarnya voltase aliran listrik yang diinginkan masyarakat, yang disediakan oleh pihak PT. PLN (Persero), yang bertanggung jawab menyediakan tenaga listrikan buat masyarakat di wilayah Republik Indonesia.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang halal adalah inti dari perjanjian dan bukan sebab dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Isi dari perjanjian haruslah sesuai dengan undang-undang, dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan kletertiban umum. Dalam hal ini objek perikatan adalah sudah jelas yaitu, aliran (Voltase) yang disuplai oleh PT. PLN (Persero). Adapun dalam transaksi pemasangan listrik para pihak tidak ada proses tawar-menawar seperti dalam transaksi jual beli dipasar atau di toko, secara langsung.

C. Syarat Penggunaan Klausul Baku Dalam Kontrak Penyediaan Listrik

Sistem hukum (perdata) Indonesia, pengaturan kontrak didasarkan pada hukum perdata yang terdapat dalam KUH Perdata buku ketiga tentang perikatan (*van verbintenissen*). Jadi hukum kontrak di Indonesia adalah bagian dari hukum perikatan. Pengertian perjanjian atau kontrak dalam KUH Perdata Pasal 1313 di rumuskan sebagai berikut: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Undang-undang tidak memberikan definisi pengertian perikatan secara pas, namun, mayoritas penulis bisa menerima rumusan yang dalam garis besar berbunyi; "Perikatan adalah suatu hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang menurut ketentuan seseorang atau lebih berhak atas sesuatu, sedang yang seorang lagi atau lebih berkewajiban untuk itu. Demikian pula rumusan perjanjian yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad¹ Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa atau keadaan".

Mariam Darus Badruzaman² yang dalam abstraksi yang secara lengkap menyatakan bahwa hingga kini belum ada hukum yang mengatur secara tegas aspek *legal homepage*

dan internet. Karena itu perlu perluasan makna dari KUHPerdata, undang-undang hak cipta, undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang merek terkait dengan hal tersebut.

Banyaknya permasalahan hadapi PT. PLN (Persero) didalam pemberian pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat, misalnya:

1. Jika keterlambatan membayar listrik dirumah tersebut, langsung di segel;
2. Jika keterlambatan membayar iuran bulanan, masyarakat dikenakan denda;
3. Seringnya pemadaman listrik secara mendadak, hal ini berakibat kerusakan barang-barang elektronik, bahkan bisa terjadi kebakaran, karena secaratiba-tiba listrik on/ hidup kembali dengan tegangan yang tinggi;
4. Sering naik turunnya voltase atau aliran listrik tidak stabil;
5. Sebagian masyarakat belum terlayani penambahan aliran/ tegangan;
6. Sebagian besar masyarakat di pinggiran kota belum terlayani, pemasangan aliran listrik baru.

Pihak-pihak dalam kontrak; Dalam tiap-tiap perjanjian, minimal terdapat dua pihak (subjek) yang terlibat didalamnya, yaitu: "Manusia atau suatu badan hukum yang mendapatkan hak; dan manusia atau badan hukum yang dibebani kewajiban".

Dalam kontrak selain para pihak juga dapat mengikat pihak ketiga lainnya yang dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum. Sebaiknya perjanjian pemasangan listrik oleh PT. PLN (Persero) haruslah jelas dan transparan apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban para pihak, sehingga masyarakat tidak dirugikan.

D. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen

Menurut Salim HS³ mengatakan, bahwa dalam hukum kontrak dikenal 5 (lima) asas penting yaitu :

¹Abdulkadir Muhammad Perjanjian baku Dalam Peraktik Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bhakti, Bandung; 1992. Hlm 24

²Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung; 1994, Hlm 65

³Salim HS , *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bhakti, jakarta; 2003, Hlm 71

1. Asas Konsensualitas;
2. Asas kebebasan berkontrak;
3. Asas Pacta sunt servanda (kepastian hukum);
4. Asas itikad baik;
5. Asas Kepribadian;

Perlindungan konsumen berasaskan yaitu; Asas Manfaat, Asas Keadilan, Asas Keseimbangan, Asas Keamanan, Asas Keselamatan Konsumen, dan Asas kepastian hukum (Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Pasal 3, UU Perlindungan Konsumen.

Adapun Tujuan Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Adapun Hak dan Kewajiban Konsumen yaitu :

1. Hak Konsumen (Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen) :
 - a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Kewajiban Konsumen (Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen) yaitu:
 - a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun Hak dan kewajiban Pelaku Usaha yaitu :

1. Hak Pelaku Usaha (Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen) :
 - a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
 - c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- e. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - f. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen)
- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Usaha ketenagalistrikan dalam Pasal di atas terdiri dari usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi :

- 1. Jenis usaha pembangkit tenaga listrik;
- 2. Usaha penyaluran transmisi tenaga listrik;
- 3. Usaha penyaluran distribusi tenaga listrik; dan Usaha pemasaran kepada konsumen;
- 4. Usaha penunjang tenaga listrik; antara lain meliputi;

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Pasal 8 UU PK) :

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

E. Hubungan Hukum Antara PT. PLN (Persero) Pelaku Usaha dan Konsumen Pengguna Jasa

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, sebagai salah satu cabang penting yang sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat, baik di pedesaan, maupun di perkotaan. Hal ini harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, disamping itu tenaga listrik mempunyai kedudukan yang penting dalam pembangunan nasional pada umumnya, dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi pada khususnya, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan Konsumen tenaga listrik mempunyai kewajiban, yang tertuang dalam Pasal 34, Ayat (2) UU Ketenagalistrikan, yaitu:

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan;
- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.

Penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan sistem tenaga listrik yang bersangkutan dan syarat-syarat kompetisi lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 68 UU Ketenagalistrikan, meliputi :

1. menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;
2. mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
 - b. mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.

F. Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Dalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen

Mengenai tanggung jawab PT. PLN (Persero) dalam penyediaan aliran listrik kepada konsumen, tirlihat di dalam Pasal 34, UU Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa, Hak dan Kewajiban Konsumen Tenaga Listrik, diatur dalam Pasal 34, Ayat (1), Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk:

- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik.
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Sedangkan Konsumen tenaga listrik mempunyai kewajiban, yang tertuang dalam

Pasal 34, Ayat (2) UU Ketenagalistrikan, yaitu:

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan;
- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian. Adapun mengenai Harga jual tenaga listrik untuk konsumen, (Hasil Wawancara Lepas Penulis dengan Kepala Bidang Pemasaran PT. PLN (Persero) Kota Palu, Tanggal 5-7 Juli Tahun 2010) yaitu terdiri dari:

1. biaya beban (Rp/kVA) dan
2. biaya pemakaian (Rp/kWh).
3. Khusus untuk konsumen industri dan komersial, selain biaya beban dan biaya pemakaian, dapat mencakup biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh) dan biaya kVA maksimum (Pasal 38, Ayat (1) UU Ketenagalistrikan).

Penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan sistem tenaga listrik yang bersangkutan dan syarat-syarat kompetisi lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 68 UU Ketenagalistrikan, meliputi :

1. menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;
2. mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
 - b. mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.

PT. PLN (Persero) didalam menyuplai ketenagalistrikan secara lancar, akan memacu

mempercepat kegiatan ekonomi masyarakat di pelosok daerah, karena Pembangunan daerah identik dengan pembangunan nasional. Sejalan dengan hal di atas, menurut C.F.G., Sunaryati Hartono⁴ mengatak “Pembangunan ekonomi adalah, pembangunan potensi-potensi ekonomi (*economic resources*).

Pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten dan Kota yaitu, agar daerah dapat secara aktif dan langsung mensukseskan pelaksanaan pembangunan nasional. Otonomi daerah adalah, sebagai kebebasan untuk menentukan dan memajukan kepentingan khusus dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan bentuk pemerintahan sendiri Wajong⁵. Dalam hubungan hal di atas, mengatakan, istilah otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian (*Zelf Standigheid*).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab PT. PLN (Persero) dalam penyediaan listrik bagi masyarakat (Konsumen) yaitu, PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya yang diberikan kewenangan oleh pemerintah melalui Pasal 33 UUD 1945, maka amanat tersebut haruslah dilaksanakan secara profesional, adapapun dalam kenyataannya PT.PLN (Persero) di Kota Palu belum melaksanakan secara sepenuhnya, hal ini daat di lihat sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak, yang berlangsung sampai 12 jam, dan terulang dalam waktu dua atau tiga bulan, belum mencerminkan visi dan misinya PT. (Persero) yaitu, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh lapisan masyarakat, disamping mencari keuntungan.
2. Tanggung jawab PT. PLN (Persero) dalam penyediaan listrik bagi masyarakat (Konsumen) yaitu, PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya yang diberikan kewenangan oleh pemerintah melalui Pasal

33 UUD 1945, maka amanat tersebut haruslah dilaksanakan secara profesional, adapapun dalam kenyataannya PT.PLN (Persero) di Kota Palu belum melaksanakan secara sepenuhnya, hal ini daat di lihat sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak, yang berlangsung sampai 12 jam, dan terulang dalam waktu dua atau tiga bulan, belum mencerminkan visi dan misinya PT. (Persero) yaitu, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh lapisan masyarakat, disamping mencari keuntungan.

B. Saran

Seharusnya hak-hak konsumen melalui kontrak baku yang dituangkan dalam surat Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik (SPJBTL yang dibuat PT.PLN (Persero), perlu menempatkan konsumen dalam posisi yang berimbang atau setara. Mengingat listrik merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan merupakan cabang produksi yang penting bagi negara, maka sudah selayaknya kewenangan tersebut di berikan sebagian kepada pihak swasta. Perlu dilakukan restrukturisasi di bidang ketenaga listrikan dengan cara melakukan perubahan disegala bidang, mulai persturan perundang-undangnya, menejerialnya.

⁴C.F.G. Sunaryati Hartono *Beberapa Masalah Hukum Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1972, Hlm 41.

⁵Wajong J, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jambatan, Jakarta, 1975, Hlm 122

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Abdulkadir Muhammad, Perjanjian baku Dalam Peraktik Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bhakti, Bandung; 1992.
- Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung; 1994.
- Salim HS ; Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya Bhakti jakarta; 2003.
- Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Hukum Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1972.
- Wajong J, Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah, Jambatan, Jakarta, 1975.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- KUH Pedata Buku III, Tentang Perikatan;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Tenaga Ketenagalistrikan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001;

BIODATA

IRPAN, Lahir di Sipayo, 27 Desember 1988, Alamat Rumah Jalan Cemara V Nomor 3 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285255940521, Alamat Email opan.zee@gmail.com

